

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan, inklusivitas, dan keberlanjutan wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif telah diluncurkan oleh pemerintah untuk mempercepat transformasi desa, antara lain Program Desa Digital yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dana Desa oleh Kementerian Keuangan, Program Inovasi Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di samping itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga meluncurkan Program Kampung Reforma Agraria (KRA) sebagai upaya komprehensif dalam mengatasi ketimpangan struktural di perdesaan.

Masing-masing program pembangunan desa umumnya membawa pendekatan sektoral sesuai dengan mandat kementeriannya. Program Desa Digital, misalnya, berfokus pada peningkatan infrastruktur dan literasi digital. Program Inovasi Desa menekankan pada pengembangan ekonomi lokal dan kreativitas masyarakat. P3PD lebih menyoroti aspek tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas aparatur. Sementara Dana Desa cenderung bersifat fiskal sebagai bentuk transfer anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar. Dalam konteks tersebut, Program Kampung Reforma Agraria (KRA) menjadi menarik untuk diteliti karena menawarkan pendekatan lintas sektor yang lebih holistik.

KRA mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan desa dalam satu kerangka

yang komprehensif, meliputi legalisasi aset melalui sertifikasi tanah, penguatan kelembagaan masyarakat desa, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta fasilitasi akses terhadap permodalan. Pendekatan ini tidak hanya menyentuh aspek legal dan ekonomi, tetapi juga menysasar dimensi sosial, kelembagaan, dan bahkan budaya desa. Berbeda dengan program-program lain yang cenderung parsial, KRA berupaya menjembatani berbagai dimensi pembangunan melalui kolaborasi antarkementerian dan lembaga.

Konteks lokal Kabupaten Banyumas memperkuat urgensi penelitian ini. Sebagai daerah dengan mayoritas wilayah berupa desa dan menjadi bagian dari inisiatif "Gerakan Menuju 100 *Smart city*" oleh Kementerian Kominfo, Banyumas menghadapi tantangan dalam menerapkan pendekatan *smart city* di luar wilayah perkotaan. Studi terhadap implementasi KRA di Desa Kalisari, Kabupaten Banyumas, menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana program ini berkontribusi terhadap pembangunan desa. Pendekatan komprehensif KRA memungkinkan eksplorasi terhadap integrasi prinsip-prinsip *smart city* ke dalam konteks perdesaan melalui penguatan sumber daya lokal, inovasi kelembagaan, dan inklusi sosial-ekonomi.

Smart city tidak hanya berbicara tentang digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga mencakup aspek tata kelola yang baik, efisiensi pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Rolando (2018) konsep *Smart city* muncul sebagai hasil sinergi antara keberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi dalam pengembangan infrastruktur, pembentukan komunitas yang aktif dalam aspek sosial, dan lahirnya ide-ide yang kreatif. Sementara itu menurut Kemenkominfo (2021) *Smart city* adalah ide pengelolaan perkotaan yang berfokus pada keberlanjutan dan daya saing, bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih aman, lebih sederhana, lebih sehat, dan lebih makmur. Konsep ini mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi

Lebih lanjut, menurut Winkowska et al. (2019), kota cerdas bukan hanya soal implementasi teknologi modern, tetapi tentang bagaimana teknologi dapat melayani kebutuhan nyata masyarakat. Mereka menyatakan bahwa *“a city can hardly become Smart only by using technology,”* melainkan harus menempatkan warga sebagai pusat dari solusi. Hal ini juga ditegaskan oleh Nam & Pardo (2014), bahwa keberhasilan *Smart city* sangat bergantung pada aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola, bukan sekedar kecanggihan digital.

Konsep *Smart city* pada awalnya lebih banyak diterapkan di kawasan perkotaan yang memiliki infrastruktur yang lebih maju, populasi yang padat, serta tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi. Namun, ketimpangan spasial dalam akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik antara wilayah urban dan rural masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Wilayah perkotaan cenderung menjadi pusat perhatian dalam program pembangunan, termasuk dalam penerapan konsep *Smart city* yang umumnya terfokus pada modernisasi berbasis teknologi tinggi di lingkungan urban. Sementara itu, wilayah perdesaan sering kali tertinggal dalam hal inovasi, konektivitas digital, dan kualitas layanan, padahal wilayah ini menyimpan potensi lokal yang besar jika dikelola secara strategis dan partisipatif.

Hal ini tercermin dalam kondisi geografis Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Kabupaten Banyumas mencapai 1.327 km², namun wilayah perkotaan hanya mencakup sekitar 38,58 km², atau sekitar 3% dari total luas wilayah, sementara 97%-nya merupakan wilayah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakter Kabupaten Banyumas sangat didominasi oleh kawasan perdesaan, dengan pusat-pusat urban hanya terkonsentrasi di empat kecamatan, yaitu Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Selatan. Keempat kecamatan ini

membentuk kawasan aglomerasi perkotaan Purwokerto sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan publik.

Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota juga menegaskan pentingnya perluasan konsep *Smart city* ke arah yang lebih kontekstual dan adaptif bagi wilayah perdesaan. Penerapan *Smart city* di wilayah kabupaten juga membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan perkotaan, mengingat perbedaan karakteristik tata ruang, demografi, aksesibilitas teknologi, hingga kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan kontekstual agar konsep *Smart city* dapat berjalan secara optimal sesuai kondisi lokal wilayah kabupaten (Rachmawati, 2018). Dalam konteks ini, transformasi digital dan tata kelola cerdas tidak bisa hanya dibangun dari aspek teknologi semata, tetapi harus mempertimbangkan kearifan lokal, kapasitas sosial, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan kebijakan.

Pembangunan pedesaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah yang relatif terpencil secara berkelanjutan (Moseley, 2003). Pembangunan desa yang inklusif menuntut penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan sebagai salah satu akar kemiskinan struktural di perdesaan. Program reforma agraria di berbagai negara telah terbukti memperkuat posisi tawar petani kecil, meningkatkan representasi politik, dan memperluas akses layanan publik (Andreanto et al., 2022). Di Asia Timur, kebijakan serupa mendorong distribusi sumber daya yang lebih merata dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Dorner & Thiesenhusen, 1990). Dalam konteks Indonesia, konsep Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) menekankan bahwa distribusi tanah tidak hanya memulihkan hak atas lahan, tetapi juga harus diikuti dengan pengembangan kelembagaan desa, penguatan ekonomi lokal, serta tata kelola ruang dan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan (KPA, 2022). Pendekatan ini selaras dengan konsep bahwa reforma agraria juga dipahami sebagai proses yang lebih luas seperti akses

(Salsabila, 2023).

Dalam konteks Desa Kalisari, pelaksanaan Program KRA telah mencerminkan upaya penguatan hak atas tanah, legalisasi aset, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga dorongan bagi usaha ekonomi produktif masyarakat. Namun, dalam penelitian ini, KRA tidak hanya dilihat sebagai program teknokratis semata, tetapi juga dianalisis dalam kerangka transformasi menuju Desa Cerdas. Konsep *Smart city* dalam hal ini diposisikan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program KRA berkontribusi terhadap dimensi-dimensi kecerdasan desa yang meliputi: *Smart Governance, Smart Society, Smart Economy, Smart Living, Smart Branding, dan Smart Environment*.

Dengan menggabungkan dua kerangka berpikir KRA sebagai program pembangunan berbasis keadilan agraria, dan *Smart city* sebagai paradigma tata kelola cerdas penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program KRA di Desa Kalisari serta mengidentifikasi keterkaitannya dengan enam dimensi *Smart city*. Pendekatan ini penting mengingat bahwa strategi pembangunan wilayah cerdas perlu disesuaikan dengan kompleksitas sosial, ekonomi, geografis, dan budaya di tingkat lokal. Seperti ditegaskan oleh Sutriadi, 2018, indikator kota cerdas di Indonesia harus disesuaikan dengan keragaman kondisi geografis, sosial budaya, dan kapasitas ekonomi daerah, karena pendekatan seragam tidak mampu menjawab kompleksitas wilayah yang beragam.

1.2. Rumusan Masalah (Pertanyaan Penelitian)

Konsep kota cerdas pada dasarnya mencakup tiga faktor penting, yaitu teknologi yang terwujud melalui infrastruktur fisik, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi; masyarakat yang diidentifikasi melalui tingkat partisipasinya; serta institusi yang diukur

melalui kualitas pemerintahan dan kebijakan (Djunaedi et al., 2018). Lebih dari sekadar digitalisasi teknologi, *Smart city* juga menekankan keberlanjutan lingkungan, peningkatan kualitas hidup, tata kelola yang baik, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta penguatan modal sosial (Toli & Murtagh, 2020).

Meski konsep ini pada mulanya dirancang untuk kawasan perkotaan dengan asumsi infrastruktur teknologi yang maju dan masyarakat dengan literasi digital tinggi (Giffinger & Gudrun, 2010), penerapannya sebenarnya tidak terbatas pada wilayah urban. *Smart city* dapat diadaptasi untuk kawasan perdesaan dengan menyesuaikan kebijakan dan pendekatan, termasuk di tingkat kabupaten yang wilayahnya mayoritas pedesaan (Akbar, 2023). Chourabi et al. (2012) bahkan menggarisbawahi bahwa inisiatif kota cerdas perlu mempertimbangkan delapan faktor penting: manajemen dan organisasi, teknologi, tata kelola, konteks kebijakan, masyarakat dan komunitas, ekonomi, infrastruktur fisik terbangun, dan lingkungan alam.

Reforma agraria merupakan kebijakan yang bersifat multidisipliner dengan tujuan utama redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kelembagaan masyarakat desa. Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, pemerintah menegaskan pentingnya penataan aset berupa legalisasi dan redistribusi tanah yang harus diimbangi dengan penataan akses seperti penguatan ekonomi, permodalan, dan kelembagaan. Reforma agraria tidak hanya slogan untuk distribusi kekayaan tetapi juga sarana menuju pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, sebagaimana terbukti dalam berbagai konteks negara dengan latar belakang sejarah, budaya, dan geografis yang sangat beragam seperti India, Italia, Bolivia, dan Jepang (King, 2019).

Kajian-kajian sebelumnya tentang reforma agraria umumnya berfokus pada aspek distribusi lahan, penyelesaian konflik agraria, atau peningkatan akses ekonomi lokal,

Mekarsari merupakan hasil implementasi penataan akses pasca penataan aset dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat Kelompok Pengolahan Hasil Ikan. Sementara itu, studi mengenai *Smart city* lebih banyak menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi, inovasi layanan publik, dan tata kelola berbasis data, misalnya penelitian Nur (2020) bertujuan untuk mengetahui bagaimana big data dapat dimanfaatkan sebagai salah satu faktor penting dalam membangun konsep *Smart city*. Belum penelitian yang secara khusus mencoba mengintegrasikan kedua pendekatan ini ke dalam satu kerangka konseptual yang utuh, khususnya dalam konteks pengembangan *Smart city* di wilayah kabupaten yang didominasi kawasan perdesaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan teoritis berupa belum adanya integrasi yang mengaitkan antara reforma agraria dan pengembangan wilayah pedesaan sebagai bagian dari strategi *Smart city* di tingkat kabupaten.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dikemukakan 2 (dua) pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Kampung Reforma Agraria di Desa Kalisari?
2. Bagaimana keterkaitan Program Kampung Reforma Agraria di Desa Kalisari terhadap dimensi *Smart city*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi Program Kampung Reforma Agraria di Desa Kalisari, dengan fokus pada tahapan-tahapan, elemen penting, wawasan mendalam, kontribusi terhadap penguatan *Smart city* di Kabupaten Banyumas.

Tujuan khusus penulisan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi Program Kampung Reforma Agraria di Desa Kalisari;
2. Mengidentifikasi keterkaitan Program Kampung Reforma Agraria di Desa

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi pengembangan keilmuan dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), maupun kontribusi langsung terhadap praktik pembangunan desa berbasis integrasi program. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu PWK melalui pendekatan integratif antara reforma agraria dan konsep *smart city*, khususnya dalam konteks wilayah kabupaten yang didominasi pedesaan. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi perencana dalam mengembangkan kebijakan pembangunan desa dan pentingnya integrasi lintas program dan sektor guna menghindari redundansi kebijakan. Dengan demikian, kajian ini memperluas cakupan teori perencanaan berbasis kolaborasi sektoral dan spasial untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa implikasi nyata bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini menunjukkan efektivitas implementasi Program Kampung Reforma Agraria di Desa Kalisari yang berhasil meningkatkan kepastian hukum atas tanah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan akses permodalan pelaku usaha. Temuan ini memberikan dasar evaluasi konkret bagi pemerintah untuk melanjutkan dan memperluas program serupa di wilayah lain.

Bagi masyarakat Desa Kalisari, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif dalam pelatihan dan program pemberdayaan agar manfaat reforma agraria dapat dirasakan secara maksimal, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan pemanfaatan lahan yang lebih produktif berbasis teknologi digital. Hal ini juga menegaskan perlunya masyarakat memahami pentingnya legalitas tanah untuk mengakses fasilitas ekonomi yang lebih luas seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

kajian lintas sektor dalam konteks pembangunan desa. Kajian ini juga mendorong lahirnya penelitian lanjutan yang mengeksplorasi integrasi antara tata ruang, kebijakan pertanahan, dan transformasi digital sebagai landasan pembangunan desa cerdas yang adaptif di tingkat kabupaten.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini telah diberlakukan pembatasan agar dapat memusatkan perhatian pada tujuan yang telah ditetapkan. Pembatasan tersebut mencakup batasan substansi, lokasi, dan waktu, sehingga memungkinkan fokus yang lebih terarah.

1.5.1. Batasan Substansi

Penelitian ini difokuskan pada implementasi Program Kampung Reforma Agraria (KRA) di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Ruang lingkup substansi yang ditelaah mencakup 2 Pilar KRA yaitu Penataan Asset melalui sertifikasi tanah dan Penataan Akses melalui pemberdayaan masyarakat pasca sertifikasi. Penelitian tidak membatasi pada satu aspek saja, melainkan mengevaluasi secara menyeluruh tahapan kegiatan, pelaksanaan, dan hasil program KRA di Desa Kalisari.

Analisis terhadap keterkaitan program KRA dengan konsep *Smart city* dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan program KRA terhadap masing-masing dimensi *Smart city* yang di kembangkan oleh Kemenkominfo (2021) yaitu: *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Society*, *Smart Living*, *Smart Environment*, dan *Smart Branding*. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara langsung ke desa-desa lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun kapasitas teknologi yang berbeda. Namun, temuan dari Desa Kalisari dapat menjadi referensi awal untuk mengembangkan kerangka integrasi

lainnya.

1.5.2. Batasan Lokasi

Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Kampung Reforma Agraria di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Desa Kalisari dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik unik sebagai sentra industri tahu dan potensi wisata alam yang signifikan. Selain itu, Desa Kalisari telah ditetapkan sebagai lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/354/tahun 2021.

1.5.3. Batasan Temporal

Penelitian ini akan mencakup periode waktu dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Batasan temporal ini dipilih untuk memungkinkan analisis yang mendalam tentang implementasi dan dampak Program Kampung Reforma Agraria selama beberapa tahun pertama pelaksanaannya. Tahun 2021 adalah penetapan Desa Kalisari sebagai lokasi *Pilot Project* dan tahap awal implementasi program. Tahun 2022-2023 adalah pelaksanaan program, meliputi berbagai tahap implementasi dan evaluasi, serta penyesuaian strategi berdasarkan temuan yang diperoleh.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa aspek keaslian yang membedakannya dari penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi baru dalam bidang studi terkait dengan reforma agraria, pembangunan desa, dan konsep kampung cerdas. Meskipun konsep reforma agraria telah banyak diteliti, studi ini secara khusus mengkaji implementasi program tersebut di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Desa Kalisari dipilih karena karakteristik uniknya sebagai sentra industri tahu dan memiliki potensi wisata yang signifikan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana program ini

diimplementasikan di desa dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang spesifik, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini menggabungkan konsep reforma agraria dengan pendekatan kampung cerdas, yang merupakan adaptasi dari konsep *Smart city* untuk wilayah pedesaan. Hal ini mencakup pada penggunaan teknologi masyarakat setempat, pemberdayaan komunitas, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Dian Herdiana	2019	Pengembangan Konsep <i>Smart Village</i> bagi Desa-Desa di Indonesia	Mengembangkan konsep <i>Smart Village</i> bagi desa-desa di Indonesia.	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen pokok <i>Smart Village</i> , yakni <i>Smart government</i> , <i>Smart community</i> dan <i>Smart Environment</i> . Ketiga elemen itu menjadi dasar untuk mencapai tujuan pengembangan <i>Smart Village</i>	Fokus dan Lokus Penelitian
2	Rohmawati	2018	Karakterisasi Kampung Kota Berdasarkan Kriteria <i>Smart Kampung</i> Menuju Surabaya <i>Smart city</i>	Menentukan kriteria <i>Smart Kampung</i> Kota Surabaya, serta melihat karakter dari kampung kota berdasarkan kriteria <i>Smart city</i> yang diadopsi pada kampung Kota Surabaya.	<i>Content Analysis</i>	Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 11 kriteria yang terbagi pada setiap dimensi <i>Smart kampung</i> .	Fokus, metode penelitian dan Lokus Penelitian

3	Farah Ananda Resti dan Harvini Wulansari	2022	Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria	Memahami peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria yakni penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses, pencanangan <i>Pilot Project</i> Kampung reforma agraria.	Fokus dan Lokus Penelitian
4	Adinda Aulia Putri Salsabila	2022	Pelaksanaan Reforma Agraria Dalam Mensejahterakan Rakyat di Kabupaten Kulonprogo tahun 2021-2022	Mengetahui dan memahami pelaksanaan reforma agrarian dalam mensejahterakan raktya di Kabupaten	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan reforma agrarian dalam mensejahterakan raktya di Kabupaten Kulonprogo terlaksana dengan cukup baik.	Fokus dan Lokus Penelitian

				Kulonprogo terlaksana dengan cukup baik.			
5	Rini Rachmawati	2018	Pengembangan <i>Smart Village</i> Untuk Penguatan <i>Smart city</i>	Menguraikan keterkaitan antara <i>Smart city</i> , <i>Smart City</i> dan <i>Smart Village</i>	Deskriptif kualitatif	Terdapat perbedaan karakteristik dan permasalahan antara kota, kabupaten dan desa, sehingga dalam pengembangan <i>Smart city</i> , <i>Smart city</i> dan <i>Smart Village</i> terdapat penekanan yang berbeda	Fokus dan Lokus Penelitian

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Penelitian ini disusun dari beberapa bagian dengan struktur penyajian berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta nilai dan dampak dari hasil penelitian serta akan dijelaskan batasan-batasan penelitian dan struktur dokumen hasil penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, akan diuraikan secara rinci kerangka konseptual atau tinjauan literatur yang menjadi landasan pengetahuan bagi peneliti dalam menjalankan penelitian. Dalam konteks ini, topik akan dipilah menjadi beberapa bagian, termasuk dasar teori yang berkaitan dengan konsep kota cerdas, dimensi-dimensi kota cerdas, strategi yang digunakan dalam pengumpulan data, dan praktik terbaik yang telah teridentifikasi dalam literatur terkait.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah yang diterapkan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Penjelasan akan mencakup jenis penelitian yang dipilih, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, dan teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti.

4. BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab mengenai gambaran umum wilayah akan mengulas kondisi wilayah penelitian di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang konteks geografis dan sosial tempat penelitian dilakukan, serta fokus pada infrastruktur desa, termasuk sarana dan

prasarana dasar, potensi ekonomi lokal, seperti industri tahu dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas masyarakat desa dan partisipasinya dalam program reforma agrarian serta lingkungan alam dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

5. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menguraikan hasil dari penelitian serta menganalisis temuan dengan memanfaatkan prosedur yang telah dijelaskan dalam bab metode penelitian. Ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian, serta memaparkan analisis yang dilakukan untuk menjelaskan temuan-temuan tersebut sesuai dengan kerangka metodologi yang telah dirancang sebelumnya.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan rangkuman dari hasil penelitian, mengidentifikasi dampak-dampaknya terhadap kebijakan yang relevan, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Ini akan memberikan kesimpulan yang komprehensif tentang kontribusi penelitian, implikasi kebijakan yang mungkin timbul, serta arah untuk penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh.

7. DAFTAR PUSTAKA

Berisi berbagai referensi literatur yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis penelitian.

8. LAMPIRAN

Berisi data pendukung penelitian yang belum dimasukkan dalam bab utama.